

Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia Wujudkan Manajemen SDA Terintegrasi

JAKARTA (IM) - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tiga hal yang konsisten didorong Indonesia dalam mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi.

Pertama, Indonesia konsisten meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusivitas untuk mencapai solusi bersama, terutama bagi negara-negara pulau kecil dan yang mengalami kelangkaan air.

"Indonesia juga mendorong pemberdayaan *hydro-diplomacy* untuk kerja sama konkret dan inovatif, menajui persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas," ujar Jokowi dalam siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (21/5).

Ketiga, Indonesia memperkuat kepemimpinan politik sebagai kunci sukses berbagai kerja sama menuju ketahanan air berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Pertemuan Tingkat Tinggi World Water Forum ke-10 (WWF) yang dihadiri 48 negara dan organisasi internasional di Bali, Senin (20/5).

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa WWF ke-10 sangat strategis untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dalam mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi.

Jokowi juga menekankan pentingnya peran air dalam kehidupan manusia. Menurutnya, tata kelola air yang berma-

salah tidak hanya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu perang dan menjadi sumber bencana.

"*Too much water* maupun *too little water*, keduanya dapat menjadi masalah bagi dunia," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Indonesia mendorong empat inisiatif konkret dalam WWF ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024. Keempat inisiatif baru yang diusung oleh Indonesia tersebut adalah penetapan *World Lake Day*, pendirian *Center of Excellence* di Asia Pasifik, tata kelola air berkelanjutan di negara pulau kecil, dan penggalangan proyek-proyek air.

"Air bukan sekedar produk alam, tapi merupakan produk kolaborasi yang mempersatukan kita sehingga butuh upaya bersama untuk menjaganya," jelas Joko Widodo. Untuk pertama kalinya sejak WWF digelar, persoalan air dunia dibahas di tingkat kepala negara atau *High Level Meeting*.

Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air dengan membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektar (ha) jaringan irigasi, 2.156 kilometer (km) pengendali banjir dan pemangangan pantai, serta merehabilitasi 4,3 juta ha jaringan irigasi.

Indonesia juga telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata sehingga didapuk sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. ● han

KSAD Jenderal Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

JAKARTA (IM) - Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak membahas kerja sama strategis di bidang pertahanan guna memperkuat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.

Hal ini dilakukan saat Maruli mengunjungi Chief of Staff of US Army atau Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat, Jenderal Randy A. George, di Markas Besar AD AS, Pentagon, Negara Bagian Virginia, Senin (20/5) waktu setempat.

Dalam kesempatan itu, Maruli dan George membahas hubungan kerja sama kedua angkatan darat.

"Rencana penyelenggaraan dan peningkatan latihan bersama (Latma) serta pertukaran personel militer dalam bidang pendidikan, menjadi salah satu topik bahasan dalam pertemuan tersebut," demikian tulis siaran pers Dinas Penerangan TNI AD, Selasa (21/5).

Maruli dan George meyakini, kerja sama itu mampu memperkuat kemitraan

strategis dan keamanan di kawasan Pasifik. George juga menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk terus mendukung Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan. Ia juga sangat menghargai hubungan erat US Army dengan TNI AD selama ini.

"Secara umum, kerja sama ini bahkan bukan hanya bermanfaat bagi kedua negara saja, tapi juga bermakna signifikan bagi stabilitas dan keamanan kawasan secara keseluruhan," kata George.

Dalam kunjungan itu, KSAD Maruli didampingi oleh Inspektur Jenderal TNI AD Letjen Erwin Djatniko, Asisten Intelijen KSAD Mayjen Drajad Brima Yoga, dan Asisten Logistik KSAD Adisura Firdaus. Kunjungan resmi itu merupakan bagian dari upaya TNI AD untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kemampuan operasionalnya melalui kerja sama internasional. ● mei

Pembunuh Polisi yang Kabur dari LPKA di Lampung Ditangkap

BANDAR LAMPUNG (IM) - Remaja berinisial AEA (17), pembunuh Briptu Singgih Abdi Hidayat yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), telah ditangkap.

Anak Berhadapan Hukum (ABH) itu ditangkap aparat Polsek Bangunrejo, Polres Lampung Tengah pada Selasa (21/5) pagi.

Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit, saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan ABH tersebut. Pembunuh anggota Polsek Bangunrejo, Polres Lampung Tengah, "Benar, tadi pagi dia ABH berinisial AEA) naik travel, dihentikan dan langsung diamankan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Bangunrejo, Polres Lampung Tengah," ujar Kapolres.

Andik menuturkan, saat ini ABH tersebut telah diserahkan kembali ke ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung.

Sebelumnya, AEA (17) seorang Anak Berhadapan Hukum (ABH) dikabarkan melarikan diri saat tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), Minggu (19/5).

AEA merupakan remaja yang dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan terhadap anggota Polres Lampung Tengah Briptu Singgih Abdi Hidayat. Remaja warga Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah itu divonis hukuman 9 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Gunung Sugih Lampung Tengah pada Selasa (7/5) lalu. ● lus

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



RAKER KOMISI X DPR DENGAN KEMENDIKB RISTEK
Makrimum Ristek Nadiem Makarim (tengah) bersama Sekjen Kemendikbud Ristek Suharti (kiri) dan Dirjen Dikristek Kemendikbud Ristek Abdul Haris (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5). Raker tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (badan hukum, BLU, dan Satker) serta pembahasan implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

MK Tolak Permohonan PPP soal Pemindahan Perolehan Suara ke Partai Garuda di Jabar

MK sebut PPP tidak uraikan secara jelas pada TPS mana saja serta terjadi pada tingkat rekapitulasi mana perpindahan suara Pemohon pada Dapil Jawa Barat V.

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan PPP dalam sengketa pilg 2024 yang mengklaim adanya pemindahan suara dari PPP ke Partai Garuda.

"Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Perohon kabur, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK, Suhartoyo, di ruang sidang

Gedung MK, Selasa (21/5).

Di sisi lain, dalam pertimbangan MK menilai bahwa PPP mengangap kehilangan suara dan berpindah ke Partai Garuda terjadi di 35 dapil di 19 Provinsi. Namun, PPP hanya membawa sejumlah bukti pemindahan suara dari Provinsi Jawa Barat.

"Namun dalam meringkaskan dugaan perpindahan perolehan suara Pemohon kepada Partai Garuda pada 6 Dapil di Provinsi Jawa Barat, Pemohon hanya memberikan uraian kehilangan suara di Dapil Jawa Barat III dan Dapil

Jawa Barat V, sedangkan untuk Dapil Jawa Barat II, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, dan Jawa Barat XI," kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah.

"Pemohon hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon tanpa diikuti oleh penjelasan dan uraian yang jelas serta memadai, padahal Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar menurut Pemohon pada dapil-dapil tersebut di atas dalam petitem Permohonan Pemohon," ujar Guntur Hamzah.

PPP dinilai tidak menguraikan secara jelas pada TPS mana saja serta terjadi pada tingkat rekapitulasi mana perpindahan suara Pemohon

pada Dapil Jawa Barat V.

PPP hanya mencantumkan angka yang diklaim sebagai suaranya yang hilang atau dipindahkan tanpa menunjukkan ataupun menguraikan data persandingan yang jelas dan memadai sehingga dapat terlihat bagaimana perpindahan suara PPP ke Partai Garuda tersebut terjadi.

"Adapun Pemohon menguraikan dugaan pergeseran suara yang dilakukan oleh Termohon pada sejumlah TPS, uraian tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya pengurangan suara Pemohon ataupun pengelembungan suara Partai Garuda Pemohon

justu menunjukkan perubahan suara terhadap partai lain yang tidak ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon," ujar Guntur.

Sebagai informasi pada hari ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar putusan sengketa pilg, secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa pilg, baik pilg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten kota yg di daftarkan di MK

Putusan tersebut terkait penentuan perkara perkara mana saja yang akan diteruskan atau tidak oleh MK ke tahap berikutnya yakni pembuktian. ● han

KPK Bakal Lelang Dua Rumah Terkait Kasus Korupsi Mantan Anggota DPRD Jabar

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang rumah dan vila, hasil rampasan dari terpidana kasus korupsi eks Anggota DPRD Jawa Barat, Abdul Rozaq Muslim.

"KPK bersama dan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon akan melaksanakan lelang barang rampasan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap dengan Terpidana Abdul Rozaq Muslim," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Selasa (21/5).

Adapun dua tanah dan bangunan yang dilelang adalah, SHM 182 di Jalan Sepakat Nomor 329, RT 19 RW 4 Desa Karangampel, Kec. Karangampel, Kabupaten Indramayu, dengan luas tanah 282 M2,

luas bangunan 1 seluas 112 M2, luas bangunan 2 seluas 65,45 M2 dengan harga limit Rp560.971.000 dan uang jaminan Rp168.291.300.

Kemudian, Tanah dan bangunan SHM 781 di Villa Casablanca Nomor 12 Jalan Raya Singajaya R 9 RW 3, Desa Singajaya, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 102 M2 dan Bangunan 61,5 M2 dengan harga limit Rp353.561.000 dan uang jaminan Rp106.068.300.

Ali menjelaskan, pelaksanaan lelang akan digelar pada Rabu 5 Juni 2024 melalui laman www.portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id.

Sebelumnya, KPK mengeksekusi mantan Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar), Abdul Rozaq Muslim ke Lembaga Pemasyarakatan

(Lapas) Sukamiskin, Bandung. Abdul Rozaq Muslim merupakan terpidana perkara korupsi dana Bantuan Provinsi (Banprov) Kabupaten Indramayu.

"Jaksa eksekutor Andry Prihandono, telah melaksanakan Putusan MA RI Nomor : 1229K/Pid.Sus/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Abdul Rozaq Muslim," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (29/4/2022).

Mantan Legislator Jabar tersebut dieksekusi ke Lapas Sukamiskin setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Berdasarkan putusan di tingkat akhir, Abdul Rozaq Muslim dijatuhi hukuman lima tahun penjara. ● han

Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara terkait Kasus Korupsi BTS 4G

JAKARTA (IM) - Mantan anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2019-2024, Achsanul Qosasi, dituntut 5 tahun penjara. Jaksa dalam tuntutan men-

nyebut, Qosasi terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Jaksa menyebut Qosasi menerima Rp40 miliar dalam kasus tersebut.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achsanul Qosasi berupa pidana penjara selama 5 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di rutan," kata Jaksa saat membacakan tuntutan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (21/5).

Selain kurungan badan, terdakwa Qosasi juga turut dituntut untuk membayar denda Rp500 juta subsidi enam bulan penjara. Terhadap Qosasi, Jaksa menyebutkan hal-hal yang meringankan tuntutan, yakni bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatan yang telah didakwakan oleh penuntut

umum terhadapnya, dan telah mengembalikan keseluruhan uang yang telah diterima secara tidak sah sejumlah USD2.640 juta yang setara dengan Rp40 miliar.

Untuk yang membebankan, perbuatan Qosasi tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN serta telah mengakibatkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tinggi negara. Pada kesempatan yang sama, Jaksa juga membacakan tuntutan untuk terdakwa Sadikin Rusli. Orang kepercayaan Qosasi ini dituntut empat tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sadikin Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan," kata Jaksa membacakan tuntutan Rusli.

Ia juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp200 subsidi tiga bulan kurungan badan. ● mei



FOTO: ANT

PENGELEDAHAN KANTOR BPKD ACEH BARAT

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Barat yang tergabung dalam Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi mengumpulkan sejumlah dokumen saat pengeledahan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di kawasan kompleks gedung Pemkab Aceh Barat, Selasa (21/5). Pengeledahan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi pajak penerangan lampu jalan yang dalam penyelidikan.

mandiri
PENAWARAN PENGALIHAN PIUTANG (Cessie / Subrogasi)
Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (Cessie / Subrogasi) terhadap debitur sebagai berikut :

Nama	Alamat	Jumlah Tagihan Per Tanggal 21 Mei 2024	Agunan Kredit
GUSTAMA MOTOR	JL.KH. WAHD HASYIM No. 159 JAKARTA PUSAT	Rp. 589.750.319,71	1. SHM No.191 a.n Agus Suryadi Tanah, Luas 8.910 m2, terletak di Desa Gurodog, Kec. Maja, Kab TK II Lebak Jawa Barat
			2. SHM No. 135 a.n T.C Agus Suryadi Tanah, Luas 7.490 m2, terletak di Desa Sidang Muya, Kec. Maja, Kab. TK II Lebak Jawa Barat
			3. SHM NO. 353 a.n T.C. Agus Suryadi Tanah, Luas 6.950 m2, terletak di Desa Parungari, Kec. Sajira, Kab. Dari II Lebak Jawa Barat
			4. SHM No. 327 A.N T.C. AGUS SURYADI Tanah, Luas 10.000 m2, terletak di Desa Parungari, Kec. Sajira, Kab. Dari II Lebak Jawa Barat
			5. SHM No. 371 A.N T.C. AGUS SURYADI Tanah, Luas 6.815 m2, terletak di Desa Parungari, Kec. Sajira, Kab. Dari II Lebak Jawa Barat
			6. SHM No. 373 A.N T.C. AGUS SURYADI Tanah, Luas 4.018 m2, terletak di Desa Parungari, Kec. Sajira, Kab. Dari II Lebak Jawa Barat

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 28 Mei 2024, jam 10.00 WIB.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Collection & Recovery Group
Collection & Recovery Center Jakarta
Wisma Mandiri II Lt.17
Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340.
Demikian untuk di ketahui semua pihak.

Jakarta, 21 Mei 2024
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Retail Collection & Recovery Group
Collection & Recovery Center Jakarta